

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, 1994, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Sodiki, 2013, Politik Hukum Agraria, Penerbit Konstitusi Press, Yogyakarta.
- Ardian Sutedi, 2006, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai Permasalahannya, BP Cipta Jaya, Bandung.
- Ahmad Nashih Luthfi, 2011, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, Pustaka Ifada dan Sajogya Institute, Yogyakarta.
- Achmad Sodiki, 2013, Politik Hukum Agraria, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2014, Opini Kebijakan Agraria, Penerbit PT Dharma Karsa Utama, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil di Indonesia, Penerbit Republik Institute, Yogyakarta.
- Gunawan Wiradi, 2005, Refrom Agraria Untuk Pemula, Jakarta, Sekertaris Bina Desa.
- H. Abdul Latif dan Nasbi Ali, 2014, Politik Hukum, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- HAW. Widjaja 2003, Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iswandi, 1998, Bisnis Militer Orde Baru, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, IndoPacific Edelman, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Laporan Akhir, Direktorat Tata Ruang Dan Pertanahan atau BAPPENAS, 2013, Kajian Arah Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015-2019. Jakarta.

- Mansour Fakhri, 2013, Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi, Penerbit Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria S.W Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2015, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Penerbit Permata Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Muhadar, 2013, Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis, Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta.
- Noer Fauzi Rachman, 2012, Land Reform Dari Masa Ke Masa, Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Penerbit Bina Aksara, Bandung.
- Sudjarwo Marsoem, Wahyono Adi dan Pieter G. Manoppo, 2015, Panduan Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah, Penerbit ReneBook, Jakarta.
- Sri Hartati Samhadi, 2007, Reformasi Agraria Yang Setengah Hati, Kompas, Jakarta.
- Sarifuddin Sudding, 2014, Perselingkuhan Hukum dan Politik Dalam Negara Demokrasi, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum Dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleng Abrar, 2004, Hukum Pertambangan, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Soetikno, Imam, 1994, Politik Agraria Nasional, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Soehino, 2000, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Vedi R Hadiz, 2005, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan; Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Jurnal:

Elita Rahmi, Tarik Menarik Antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pertanahan, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009.

Wijayanto, Bima P.Santoso, Tedy J. Sitepu, Junaidi. 2011. *Laporan Penelitian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Mencari Solusi Permasalahan Pertanahan, Mempercepat Proses Pembangunan Nasional*. Penerbit Paramadina Public Policy Institute.

Winahyu Erwiningsih, Pelaksanaan Peraturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945, *Jurnal Hukum*, Yogyakarta, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009.

Peraturan perundang-undang:

UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), (3), dan (4) Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kekuasaan (L.N. Tahun 1960 No. 158 T.L.N Nomor 2106) dengan implikasi khusus dalam Pasal 22 Keppres Tahun 1993 yang menentukan bahwa tanah yang digarap tanpa izin yang berhak atau kuasanya penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 51 Tahun 1960.

Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang di atasnya (L.N. Tahun 1961 No. 288 T.L.N No. 11324).

Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (L.N. Tahun 1992 No. 115 T.L.N. No. 3501).

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Perpres Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara (L.N. Tahun 1953 No. 14 T.L.N No. 362).

Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Permendagri Nomor 2 tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

Permendagri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksana Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah atas Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005.

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (T.L.N No. 2043).

Web:

<http://intisari-online.com/read/mencari-pemilik-yang-sebenarnya-atas-tanah-bersertifikat-ganda>, 06 Nopember 2014 - 11:00 am

http://id.wikipedia.org/wiki/kasus_kedung_ombo, 17 Mei 2015.

Media Cetak:

Koran Tribun Jogja, DIY Kembangkan Sistem Bank Tanah Untuk Investor, 28 Maret 2015.

Artikel Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran (ARMP), Darurat Agraria; Himpunan Masalah Agraria Struktural Di DIY. Parangkusumo.